

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah masalah sosial yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang telah lama ada dan masih menjadi pembahasan menarik untuk diteliti. Badan Pusat Statistik (BPS) menafsirkan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi standar minimal kebutuhan dasar untuk hidup layak dimana kondisi tersebut berada dibawah garis standar nilai kebutuhan minimum yang disebut dengan *poverty line*. Berdasarkan data BPS dalam publikasi berjudul statistik indonesia 2023, keseluruhan penduduk miskin tahun 2022 berjumlah 26,2 juta jiwa atau setara dengan 9,5 persen penduduk Indonesia dengan *poverty line* negara Indonesia tahun 2022 sebesar Rp. 552.349/bulan. Artinya 26,2 juta jiwa masyarakat Indonesia masuk kategori penduduk miskin dikarenakan memiliki penghasilan dibawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Komitmen negara Indonesia dalam pengentasan kemiskinan termaktub jelas dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Perwujudan komitmen tersebut adalah dengan cara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi dalam memberikan bentuk pelayanan sosial seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yakni pemberdayaan sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan rehabilitasi sosial. Dengan amanat

konstitusi tersebut, setiap tahunnya negara berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan kesejahteraan sosial melalui berbagai bentuk bantuan yang diberikan.

Salah satu bentuk pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial adalah hadirnya Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini telah hadir sejak tahun 2007 dengan dasar hukum pelaksanaannya terdapat pada Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Menurut Petunjuk Teknis (Juknis) PKH, program ini menjadi *center of excellence* pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah berharap hadirnya PKH dapat menghasilkan *outcomes* mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Implementasi PKH nampaknya belum berjalan secara maksimal dan tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi. Misalnya di Kabupaten Brebes, terdapat rumah mewah yang diketahui mendapatkan PKH. Pendamping PKH di Kabupaten Brebes menuturkan bahwa ketidakakuratan penerima bantuan terjadi karena warga tidak berkenan untuk mundur dari penerima bantuan sosial¹. Kejadian serupa terjadi di Kabupaten Klaten, terdapat dua rumah berlantai dua yang dapat dikategorikan rumah mewah masuk sebagai penerima PKH². Namun jika mengutip pernyataan Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) dari UGM, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan disebabkan karena tahap validasi data yang tidak dilakukan dengan baik oleh petugas sehingga menyebabkan NIK penerima bantuan sosial tidak valid, NIK yang didaftarkan ganda, dan orang yang sudah meninggal tetap menjadi penerima bantuan³. Padahal

¹ <https://regional.kompas.com/read/2020/05/04/18405441>

² <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4830297>

³ <https://ugm.ac.id/id/berita/23604>

jika melihat pada regulasi, Pasal 8 ayat (8) dan (9) Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin tersurat jelas bahwa yang berhak melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan adalah Pemerintah daerah, kemudian hasil verifikasi dan validasi tersebut disampaikan ke gubernur untuk diteruskan kepada Menteri. Artinya pemutakhiran data kemiskinan adalah hal yang harus dilakukan oleh masing-masing daerah.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1902/4/SHK.05.02/05/2019 terkait labelisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada tanggal 9 Mei 2019. Surat Edaran tersebut dibuat dengan tujuan agar penerima PKH dapat lebih dengan memperbolehkan pemasangan daftar nama KPM penerima bantuan sosial di tempat umum dan memberikan tanda/label dirumah KPM PKH dan BPNT. Adapun Andriani (2021) menjelaskan bahwa:

“Tujuan dari Labelisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah untuk memutakhirkan data dengan ketat sehingga dapat diketahui KPM Program Keluarga Harapan (PKH) mana saja yang masih layak mendapatkan bantuan dan mereka yang sudah lulus dari program PKH. Melalui program ini diharapkan KPM Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah mampu secara ekonomi bisa dengan suka rela untuk graduasi secara mandiri sehingga dapat diisi keluarga prasejahtera lainnya untuk mendapatkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)”

Satu dari sekian banyak daerah yang menerapkan kebijakan labelisasi Keluarga miskin melalui pemasangan stiker keluarga miskin adalah Kota Surabaya. Pemkot Surabaya membuat dasar hukum dengan hadirnya Perwali Kota Surabaya No 106 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin. Pada Pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa

masyarakat yang masuk dalam data keluarga miskin diberi penanda di tempat tinggalnya yang tidak diperbolehkan untuk ditutupi ataupun dirusak. Selanjutnya dalam ayat (4) dijelaskan konsekuensi apabila penanda tersebut ditutup, rusak atau hilang maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan intervensi lagi (graduasi). Bentuk labelisasi keluarga miskin yang akan digunakan dijelaskan pada ayat (5) yang menyatakan bahwa bentuk penanda ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial.

Kebijakan labelisasi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Surabaya ditujukan bagi masyarakat dengan kriteria di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Sebagai bentuk penanda, rumah keluarga yang memenuhi kriteria tersebut akan ditempel stiker. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk mengangkat taraf hidup keluarga miskin. Adapun Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan hal tersebut⁴,

"Kita angkat (ekonominya) agar tidak menjadi miskin dalam satu tahun ke depan. Sehingga orang Surabaya tidak *njagakno* (menggantungkan) bantuan saja. Tapi bagaimana dia bisa berusaha dan lepas dari kemiskinan. "

Bentuk langkah konkret Pemerintah Kota Surabaya dalam pengentasan kemiskinan dilakukan melalui labelisasi keluarga miskin. Pada bulan Desember 2022, secara simbolis Eri Cahyadi beserta jajaran Komisi D DPRD Kota Surabaya menempelkan 5 stiker "keluarga miskin" yang dibarengi dengan pemberian bantuan modal berupa sembako untuk membuka toko di depan rumah. Bantuan modal berupa sembako tersebut merupakan jenis bantuan tambahan yang diberikan oleh

⁴ <https://www.surabaya.go.id/id/berita/71990>

Pemkot Surabaya kepada keluarga miskin sehingga dapat memiliki penghasilan sendiri.

Gambar 1.1 Wujud Stiker Keluarga Miskin



Sumber: Website PDIP Perjuangan Jawa Timur

Kebijakan labelisasi keluarga miskin yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya berfokus pada penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saja. Seperti pada gambar 1.1 diatas, terdapat program-program lainnya yang dapat mendorong masyarakat terlepas dari kategori keluarga berpenghasilan rendah. Muatan program pengentasan kemiskinan yang tercakup dalam stiker gakin ini antara lain: 1) Program Keluarga Harapan (PKH), 2) Permakanan, 3) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), 4) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan 4) dll (program-program lainnya yang termasuk program pengentasan kemiskinan yang disediakan Pemerintah Kota Surabaya).

Ketepatan sasaran penerima bantuan dibutuhkan oleh Pemerintah setempat dikarenakan Kota Surabaya termasuk dalam wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk miskin terbesar di provinsi Jawa Timur. Jika dilihat melalui data BPS

2023, daerah perkotaan dengan penduduk miskin terbesar di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Miskin
pada Wilayah Perkotaan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2022

No	Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)
1	Kota Surabaya	138,21
2	Kota Malang	38,56
3	Kota Kediri	21,15

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, Surabaya merupakan kota dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Provinsi Jawa Timur. Dimana jika dibandingkan dengan data kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 4.236.510 jiwa, 3,26%-nya berasal dari Surabaya. Meskipun demikian, Pemerintah Surabaya sebenarnya telah menjalankan sejumlah program yang cukup baik dalam pengentasan kemiskinan. Hasilnya, dari tahun ke tahun presentase jumlah penduduk miskin terus berkurang. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Jumlah Penduduk Miskin
di Kota Surabaya Tahun 2016-2022

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase
2016	Rp 438.283	161,01	5,82
2017	Rp 474.365	154,71	5,39
2018	Rp 530.178	140,81	4,88
2019	Rp 567.474	130,55	5,51
2020	Rp 592.137	145,67	5,02
2021	Rp 611.466	152,49	5,23
2022	Rp 652.540	138,21	4,72

Sumber: BPS, Kota Surabaya dalam Angka 2023

Meskipun nominal *poverty line* terus bertambah, angka kemiskinan berhasil dikurangi secara berangsur-angsur oleh Pemerintah setempat. Hal ini dapat dilihat

dari tabel 1.2 dimana pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan sebesar 9% dari tahun sebelumnya.

Sayangnya, kebijakan labelisasi yang diharapkan mampu mengoptimalkan penetapan penerima program bantuan dan berimplikasi pada graduasi mandiri, justru tidak sejalan dengan apa yang diharapkan. Misalnya Hidayat dkk (2022) mengatakan dalam penelitiannya bahwa pemberian labelisasi keluarga miskin ini berdampak pada penerima PKH yang merasa canggung dalam masyarakat, penerima PKH menjadi buah bibir, dan diremehkan oleh masyarakat. Pun halnya Buchory (2019) meneliti tentang pengaruh pemasangan stiker labelisasi miskin terhadap graduasi mandiri dan patologi sosial yang menyatakan bahwa stiker miskin tidak begitu efektif dalam menggraduasi PKM bahkan justru menimbulkan tekanan patologi sosial pada KPM yang masih memenuhi kriteria PKH.

Penelitian tentang labelisasi keluarga miskin juga dilakukan oleh Andriani (2021) di Kabupaten Bener Meriah. Dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa upaya memberikan tanda miskin kepada masyarakat penerima bantuan yang mampu secara ekonomi agar dengan sadar melakukan graduasi mandiri pun tidak sesuai apa yang diharapkan, justru masyarakat dengan kategori keluarga miskin melakukan graduasi mandiri karena tekanan sosial dari stigma yang muncul dari kebijakan tersebut. Dari ketiga penelitian di atas muncul dugaan bahwa kebijakan labelisasi keluarga miskin merupakan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan dengan cara yang tidak etis. Dugaan tersebut memunculkan hipotesa bahwa kemiskinan tidak benar-benar berkurang, justru masih terdapat masyarakat yang seharusnya mendapatkan perhatian, namun karena

kebijakan ini mereka enggan mendapatkan bantuan. Sementara itu, jauh sebelum kebijakan labelisasi keluarga miskin di Kota Surabaya diformulasikan dan diimplementasikan, pada 18 juni 2019 Direktur Jendral (Dirjen) Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia, mengeluarkan surat nomor 1000/LJS/HM/01/6/2019 yang berisikan bahwa penggunaan frasa “keluarga miskin” hendaknya diganti “keluarga pra sejahtera”.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan labelisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Surabaya dalam mengentaskan kemiskinan akan menjadi topik menarik untuk diteliti lebih lanjut. Labelisasi yang awalnya diharapkan mampu mendorong adanya graduasi mandiri bagi penerima bantuan sosial yang mampu secara ekonomi justru menjadi salah satu sekat bagi pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat di bawah garis kemiskinan karena mendapatkan stigma yang muncul dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan publik seharusnya bukan sekedar ada tetapi cerminan dari sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat (Tangkilisan, 2003:2). Sehingga perlu untuk dilakukan penelitian terhadap evaluasi kebijakan labelisasi keluarga miskin untuk mengetahui sejauh mana kebijakan ini dapat menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Kota Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana penerima gakin mengevaluasi program stikerisasi keluarga miskin di Kota Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan stikerisasi keluarga miskin yang sempat menimbulkan kegaduhan karena dinilai bukan pilihan yang tepat untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan serta dirasa merendahkan masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada rumpun Ilmu Pemerintahan dan memberikan tambahan kajian literatur mengenai upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui labelisasi keluarga miskin.

1.4.2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pemerintah daerah atas usaha yang telah dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Surabaya melalui kebijakan labelisasi keluarga miskin sehingga nantinya dapat menjadi masukan dan dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Surabaya. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan memperluas perbendaharaan pengetahuan melalui dinamika kebijakan labelisasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

1.5. Penelitian Terdahulu

Salah satu tahapan penting dalam proses penelitian adalah melakukan kajian terhadap penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu digunakan untuk memperdalam

dan memperluas kajian *empirical problem* yang sedang diangkat. Penelitian tentang labelisasi keluarga miskin merupakan salah satu dari sekian banyak penelitian yang belum banyak diteliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan labelisasi keluarga miskin, yaitu:

1. Achmad Buchory (2019)

Dalam penelitian yang berjudul “Survei tentang Pengaruh Pemasangan Stiker Labeling Miskin KPM PKH terhadap Graduasi Mandiri dan Tekanan Patologi Sosial” merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan labelisasi terhadap graduasi mandiri dan pengaruhnya terhadap tekanan patologi sosial masyarakat. Fokus dari penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh pemasangan stiker penanda “keluarga miskin” terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah dan dampak sosial yang dialami. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori penerima manfaat (KPM) yang mengalami graduasi dampak dari kebijakan labelisasi. Instrumen penelitian ini berupa survei dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak terbukti efektif dalam menggraduasi Keluarga Penerima Manfaat secara mandiri. Justru dengan hadirnya kebijakan ini justru menimbulkan polemik seperti beban psikologi sosial terhadap KPM yang memaksanya keluar dari lingkaran kemiskinan.

2. M. Rahmat Hidayat (2022)

Dalam penelitian yang berjudul “Dampak Pemberian Label Miskin Kepada Keluarga Penerima Bantuan Pkh Di Jorong Tanjung Durian Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan” merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kebijakan labelisasi pada masyarakat kelurahan Jorong Tanjung Durian Kabupaten Solok Selatan. Fokus dari penelitian ini yakni untuk meneliti dampak yang ditimbulkan dari kebijakan labelisasi KPM di kelurahan Jorong Tanjung Durian Kabupaten Solok Selatan. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Instrumen penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan labelisasi memiliki dampak negatif dan positif pada KPM. Dampak negatif dari kebijakan ini seperti: 1) KPM merasa canggung, 2) KPM menjadi pembicaraan di masyarakat, dan 3) diremehkan dalam masyarakat. Dampak positif dari kebijakan ini yakni: 1) berpeluang anak KPM menerima beasiswa di sekolah dan 2) berpeluang menerima bantuan lagi di masa depan.

3. Wiwin Andriani (2021)

Dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Labelisasi Keluarga Penerima Manfaat Dalam Mewujudkan Program Keluarga Harapan Yang Tepat Sasaran di Kabupaten Bener Meriah” merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh labelisasi KPM terhadap usaha pemerintah dalam

mewujudkan PKH yang tepat sasaran penerima. Fokus dari penelitian ini untuk meneliti pengaruh kebijakan labelisasi KPM terhadap ketepatan sasaran penerima PKH. Responden pada penelitian ini adalah masyarakat penerima PKH pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bener Meriah. Instrumen penerima yang digunakan berupa observasi, angket/kuesioner, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yakni terdapat pengaruh signifikan kebijakan labelisasi keluarga miskin terhadap ketepatan sasaran penerima PKH di Kabupaten Bener Meriah yang didapatkan dari hasil perhitungan regresi linear sederhana dengan nilai sebesar 0,94. Namun masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan ini seperti tidak dilakukan penempelan stiker pada seluruh penerima PKH dan adanya temuan masyarakat yang melakukan graduasi mandiri meskipun belum masuk kategori sejahtera.

4. Avita Nur'aini (2021)

Dalam penelitian yang berjudul “Stigma dan Inklusi Sosisal pada Implementasi Kebijakan Stiker ‘Keluarga Miskin’ Bagi Penerima Manfaat PKH Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupten Klaten” merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan stiker “keluarga miskin” dalam mengelola stigma dan pengaruhnya terhadap inklusi sosial pada penerimaan manfaat bantuan sosial PKH. Fokus dari penelitian ini untuk meneliti pengaruh kebijakan labelisasi KPM terhadap stigma dan implikasinya terhadap inklusi sosial. Informan pada penelitian ini adalah masyarakat penerima PKH di Desa Jimbung, kabupaten Klaten.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penempelan stiker keluarga miskin di Desa Jimbung memunculkan stigma kepada keluarga penerima manfaat. Dari studi kasus ini memunculkan tiga tingkatan stigma yakni: 1) stigma pribadi yang berarti masyarakat malu dan takut mendapatkan pandangan yang berbeda dari orang lain; 2) stigma sosial yang berarti stigma yang didapatkan keluarga penerima manfaat (KPM) berupa perkataan tidak baik dari masyarakat; 3) stigma institusional yang berarti bentuk stigma yang diterima melalui stiker dengan frasa keluarga miskin. Namun adanya stigma dari kebijakan labelisasi keluarga miskin di Desa Jimbung tidak berpengaruh negatif pada bangunan inklusi sosial masyarakat karena terdapat program bantuan yang diberikan seperti BPS, KIS, dan kuota afirmasi bagi anggota KPM serta budaya *ewuh pakewuh* dan tolong menolong yang mendarah daging di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan keempat penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Persamaan yang ada dari keempat penelitian tersebut terletak pada pengambilan topik penelitian yang digunakan yaitu mengenai kebijakan labelisasi keluarga miskin. Sedangkan perbedaan dari empat penelitian diatas terletak pada lokasi penelitian yang berbeda serta menempatkan permasalahan kebijakan labelisasi tidak hanya berfokus pada upaya kemiskinan secara mikro (Program Keluarga Harapan), namun penelitian ini memfokuskan kebijakan labelisasi sebagai upaya Pemerintah Kota Surabaya secara makro, artinya dengan masyarakat diberikan label keluarga miskin tidak semata sebagai persyaratan penerima bantuan PKH namun sebagai upaya dari Pemkot Surabaya

untuk mengentaskan kemiskinan melalui berbagai macam program yang disediakan.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Politik Kebijakan

Secara umum pandangan mengenai politik kebijakan disampaikan oleh Thomas R. Dye (2005) melalui pengertian kebijakan publik. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” yang berarti apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Secara lebih spesifik, Humau (2018:10) menafsirkan politik kebijakan adalah proses politik mengenai bagaimana pola kekuasaan dan pengaruh dalam sebuah organisasi bekerja mempengaruhi keseluruhan tahapan kebijakan termasuk dalam tahap implemementasi. Seperti pendapat Humau, Nugroho (2014:244) menafsirkan politik kebijakan sebagai aturan main yang dilegalkan dengan bentuk kebijakan. Artinya Baik dan buruknya kebijakan publik mencerminkan keyakinan dan kebaikan yang dianut oleh para pembuat dan pelaksana kebijakan melalui proses politik.

Politik kebijakan tidak hanya mengkaji tentang adanya intervensi politik terhadap sebuah kebijakan. Menurut Nugroho (2014:110) politik kebijakan tidak hanya tentang bagaimana kebijakan diintervensi oleh proses politik semata, tetapi bagaimana kebijakan tersebut dapat dibuat dan dijalankan melalui asas

pemerintahan yang baik seperti prinsip akuntabilitas, responsivitas, transparansi, keadilan, dan partisipasi.

1.6.2. Labelisasi

Labelisasi atau Stigma didefinisikan oleh Smith (2002:317-325) sebagai pandangan terhadap seseorang yang dianggap berbeda sehingga membuat individu terpinggirkan dan rentan mendapatkan diskriminasi. Pendapat tersebut selaras diungkapkan oleh Crocker (dalam Hidayat dan Sabiqotul Husna, 2021: 165-166) menjelaskan bahwa stigma terjadi karena individu memiliki atau dipercaya memiliki karakteristik identitas sosial yang dinilai rendah atau berbeda dimata orang lain. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Goffman (1963:3) yang menjelaskan bahwa stigma adalah hasil dari konstruksi sosial karena individu memiliki atribut yang berbeda sehingga berpeluang untuk didiskreditkan.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Lemmert. Menurutnya pemberian julukan/cap kepada seseorang karena penyimpangan yang dilakukan. Mulanya penyimpangan yang dilakukan bersifat penyimpangan primer namun adanya pemberian cap menjadikan orang tersebut mengidentifikasikan dirinya sesuai dengan pemberian label tersebut. Pengertian tersebut menekankan bahwa labelisasi memiliki kecenderungan berkonotasi negatif karena pemberian cap dilakukan kepada seseorang yang melakukan penyimpangan meskipun penyimpangan tersebut tidak dilakukan secara berulang (Masrizal, 2015:12). Dari keempat teori tersebut dapat disederhanakan bahwa pada pemberian label terjadi karena seseorang melakukan perbuatan menyimpang atau memiliki atribut berbeda yang dinilai rendah dari manusia normal sehingga membuatnya mendapatkan perlakuan

diskriminasi bahkan menjadikan orang yang diberikan label memiliki karakteristik seperti julukan yang diberikan.

Karakteristik identitas stigma dibagi menjadi dua pandangan oleh Goffman, antara lain:

- *Virtual Social Identity*

Stigma yang terbentuk karena karakter yang diasumsikan atau dipikirkan terhadap seseorang.

- *Actual Social Identity*

Stigma yang terbentuk dari karakter yang sudah terbukti (dalam Masola, 2022:211).

Dari kedua karakteristik stigma diatas, stigma yang dialami seseorang akan efek seperti ketakutan, kecemasan akut, kesulitan dalam mengungkapkan emosi, kesedihan, dan stress (Hidayat dan Sabiqotul Husna, 2021: 165-166).

1.6.3. Evaluasi Kebijakan

William N. Dunn pakar kebijakan publik mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai tahapan memproduksi informasi melalui penaksiran/pemberian angka/penilaian yang digunakan untuk mengetahui nilai atau manfaat dari kebijakan. Dengan kata lain, ketika pelaksanaan kebijakan mempunyai nilai manfaat maka kebijakan tersebut dikatakan mampu menjawab permasalahan yang tengah diatasi dengan kebijakan tersebut (Dunn, 2003:608). Pendapat tersebut diperkuat oleh Nugroho (2003:73-74) menurutnya, evaluasi kebijakan merupakan tahapan terakhir dari siklus kebijakan sehingga dimanfaatkan untuk mengetahui hasil dari suatu kebijakan apakah telah mencapai tujuan atau tidak. Dengan adanya

evaluasi pada sebuah kebijakan/program yang dibuat oleh pemerintah membuat pemangku jabatan mendapatkan masukan bahan evaluasi untuk dilakukan perbaikan ataupun diberhentikan.

Selain itu menurut Briant & White seperti yang dikutip oleh Wibawa (1994:63) menjelaskan bahwa pada dasarnya evaluasi kebijakan dilakukan untuk mencari tau seberapa jauh implementasi kebijakan mencapai tujuan. Sehingga evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui penilaian pada tahap implementasi guna mencari tau dampak dan akibat yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.

Evaluasi kebijakan menurut Dunn memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

1. Fokus nilai, evaluasi kebijakan tidak sekedar dilakukan untuk mengetahui hasil dari kebijakan melainkan sebagai usaha untuk mengetahui manfaat atau dampak kebijakan.
2. Interpretasi fakta nilai, kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila manfaat yang didapatkan oleh sasaran kebijakan sesuai dengan bukti di lapangan
3. Orientasi masa kini dan masa lampau, evaluasi digunakan untuk membandingkan kondisi setelah adanya kebijakan dengan sebelum adanya kebijakan
4. Dualitas nilai, nilai yang menjadi dasar evaluasi kebijakan memiliki kualitas ganda sebagai tujuan dan cara (Dunn, 2003:608-609)

Dari karakteristik evaluasi kebijakan diatas, dapat diketahui bahwa tahapan evaluasi merupakan proses penting dalam kebijakan. Tanpa adanya evaluasi mustahil suatu

kebijakan dapat memecahkan permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan memiliki fungsi, antara lain:

1. Mendapatkan informasi yang valid mengenai kinerja kebijakan dalam mencapai tujuan
2. Memberikan sumbangan klarifikasi dan kritik terhadap nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target
3. Memberikan sumbangan dalam perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan yang akan datang (Dunn, 2003:609-611)

Untuk melakukan evaluasi kebijakan yang baik dengan *margin of error* yang kecil dibutuhkan serangkaian tahapan. Edward A. Suchman (Situmorang, 2016:) menjelaskan terdapat enam tahapan dalam melakukan evaluasi kebijakan, antara lain:

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
2. Menganalisis masalah
3. Mendekripsikan dan mencari standarisasi kebijakan
4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
5. Menganalisa apakah perubahan yang terjadi adalah akibat dari kebijakan yang sedang diamati atau karena penyebab lain
6. Beberapa indikator digunakan untuk mengetahui dampak dari kebijakan

1.7. Definisi Konsep

Azwar (2007:72) menjelaskan bahwa definisi konseptual adalah sebuah pengertian yang berbentuk rancangan atau konsep dan terkadang maknanya abstrak meskipun dapat dipahami maksudnya. Definisi konseptual berasal dari abstraksi kata perkata, sehingga dapat membantu pemahaman. Definisi konseptual juga digunakan sebagai unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti (Situmorang, 2016).

Definisi konseptual pada penelitian ini adalah evaluasi kebijakan yang dapat dimaknai sebagai serangkaian proses untuk menilai kebijakan yang telah berjalan guna mencari tau apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan tujuan diformulasikan kebijakan. Penelitian ini menggunakan konsep evaluasi kebijakan yang diperkenalkan oleh William N Dunn melalui beberapa variabel yang digunakan untuk menilai implementasi kebijakan, sebagai berikut:

Tabel 1.3 Deskripsi Variabel Evaluasi Kebijakan

Variabel	Pengertian
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?
Efisiensi	Berapa banyak dipergunakan sumberdaya?
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan masalah?
Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok target yang berbeda?
Responsivitas	Apakah prograam memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Apakah program benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

1.8. Definisi Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel adalah pengertian yang memiliki arti tunggal sehingga harapannya sebuah penelitian dapat dibuat secara objektif (Azwar, 2007:72). Sederhananya, definisi operasional dapat diartikan sebagai kumpulan petunjuk mengenai cara mengukur variabel yang telah didefinisikan secara konseptual.

Untuk memudahkan dalam mengukur konsep evaluasi kebijakan seperti yang terdapat pada tabel 1.4 maka dari itu perlu untuk diturunkan menjadi indikator penelitian, antara lain:

1.8.1. Efektifitas

Variabel efektifitas dalam teori evaluasi William N Dunn berkaitan dengan penilaian tujuan dari dibuatnya kebijakan. Variabel ini digunakan untuk melihat keselarasan antara tujuan awal dibuatnya kebijakan dan hasil yang telah dicapai. Untuk dapat menilai variabel efektifitas maka harus diturunkan melalui indikator penelitian.

Menurut Budiani (2007:53-54) terdapat empat indikator yang dapat digunakan untuk menilai apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan harapan yang diinginkan, antara lain:

1. Ketepatan sasaran program, yakni kesesuaian peserta program/kebijakan dengan sasaran yang disepakati dalam Perwali kota Surabaya No 106 Tahun 2022 junto Perwali kota Surabaya No 117 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin.

2. Sosialisasi Program, yakni tahapan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan sehingga informasi pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat dan sasaran kebijakan
3. Tujuan program, yakni kesesuaian hasil program dengan tujuan awal kebijakan dibuat
4. Pemantauan program, yakni tahapan untuk mengawasi keberjalanan program sehingga dapat diketahui apakah tujuan yang diinginkan dari program telah terpacai atau tidak.

1.8.2. Efisiensi

Variabel efisiensi dalam teori ini berkaitan dengan kebutuhan sumberdaya yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan. Semakin kecil sumber daya yang digunakan maka sebuah kebijakan dapat dikatakan semakin efisien. Untuk dapat menilai variabel efisiensi kebijakan maka dapat diturunkan melalui dua indikator yang digunakan oleh Khothimah (2021:30), antara lain:

1. Efisiensi Sumber daya manusia
2. Efisiensi waktu

1.8.3. Kecukupan

Variabel kecukupan dalam teori ini berkaitan dengan *outcomes* sebuah kebijakan mampu menyelesaikan masalah. Untuk dapat menilai variabel kecukupan dari kebijakan, terdapat beberapa indikator untuk digunakan, antara lain:

1. Menyelesaikan permasalahan

Labelisasi keluarga miskin memecahkan permasalahan masyarakat diakibatkan oleh ketidaktepatan sasaran penerima bantuan

2. Perubahan sikap dan pola pikir masyarakat setelah adanya kebijakan labelisasi. (Damanik dan Marom, 2016:226)

1.8.4. Pemerataan

Variabel pemerataan dalam teori ini berkaitan dengan pendistribusian kebijakan yang merata kepada kelompok sasaran. Untuk dapat menilai variabel pemerataan dari kebijakan, maka diturunkan turunan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Duri dan Rahmah (2020:50), antara lain:

1. Pemerataan distribusi program, yakni pelaksanaan kebijakan labelisasi merata kepada semua sasaran.
2. Outcomes pemerataan, yakni kebijakan labelisasi keluarga miskin mampu mengurnagi jumlah masyarakat miskin dengan pendapatan yang meningkat ataupun berkurangnya pengeluaran masyarakat.

1.8.5. Responsivitas

Variabel responsivitas dalam teori ini berkaitan dengan kepuasan kelompok sasaran terhadap hasil implementasi kebijakan. Untuk dapat menilai variabel responsivitas maka dapat diturunkan melalui indikator, sebagai berikut:

1. Memuaskan kebutuhan preferensi kelompok sasaran
2. Tanggapan kepuasan kelompok (Khothimah, 2021:32)

1.8.6. Ketepatan

Variabel ketepatan dalam teori ini berkaitan dengan preferensi kelompok sasaran terhadap hasil yang dicapai dari sebuah kebijakan. Untuk dapat menilai variabel ketepatan maka dapat diturunkan melalui indikator, sebagai berikut:

1. Nilai Manfaat program
2. Dampak Tak Terduga (Leiju, 2014:524)

Berdasarkan turunan variabel evaluasi kebijakan diatas, maka operasionalisasi variabel penelitian ini dapat disederhanakan sebagai berikut:

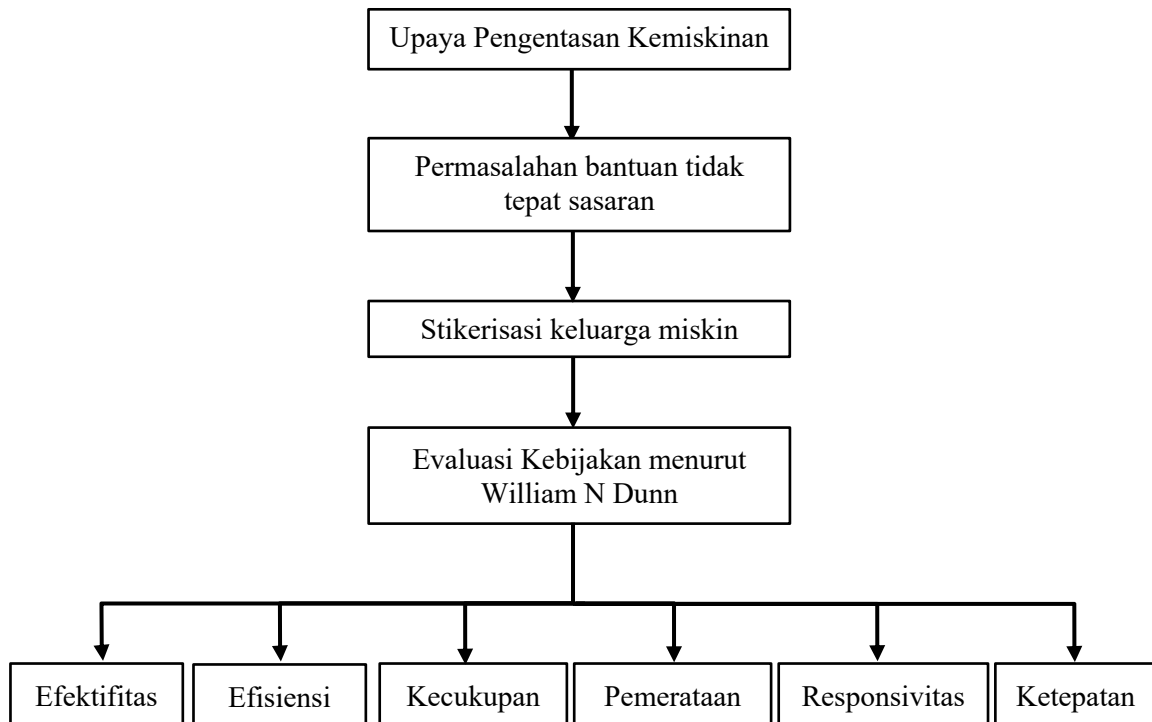
Tabel 1.4 Indikator Evaluasi Kebijakan Labelisasi

Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala	No pada instrumen
Efektifitas	Ketepatan sasaran program	Penerima stiker miskin telah sesuai dengan kriteria keluarga miskin	Ordinal	1.1
		Adanya stiker miskin tidak mengurungkan niat penerima untuk mendapatkan bantuan	Ordinal	1.2
	Sosialisasi Program	Adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh RT/RW/KSH/pihak terkait	Ordinal	1.3
		Masyarakat diberi penjelasan saat ditempel stiker miskin	Ordinal	1.4
	Tujuan Program	Adanya labelisasi membuat penetapan keluarga miskin lebih optimal	Ordinal	1.5
		Masyarakat mampu tidak lagi memiliki kesempatan mendapatkan bantuan	Ordinal	1.6
	Pemantauan program	Terdapat pemantauan dari petugas (RT/RW/KSH/kelurahan/pihak terkait) terhadap keberadaan stiker	Ordinal	1.7
		Terdapat pemantauan dari petugas terhadap bantuan yang diberikan	Ordinal	1.8
Efisiensi	Sumber daya manusia	Responden meyakini Petugas lapangan telah bekerja dengan optimal menjangkau masyarakat miskin	Ordinal	2.1
		Petugas lapangan (RT/RW/KSH) tidak pilih kasih dalam memilih warga yang akan didaftarkan	Ordinal	2.2
	Waktu	kemudahan masyarakat mengetahui yang layak menandatangani tidak untuk dilaporkan	Ordinal	2.3
		Masyarakat memperhatikan rumah yang ditempel stiker gakin	Ordinal	2.4
Kecukupan	Menyelesaikan permasalahan	Kebijakan labelisasi keluarga miskin menyelesaikan masalah ketidaktepatan sasaran penerima bantuan	Ordinal	3.1
		Penurunan angka kemiskinan	Ordinal	3.2
	Perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir	Masyarakat tidak konsumtif	Ordinal	3.3
		Keinginan bekerja meningkat	Ordinal	3.4
		Tidak mengandalkan bantuan pemerintah	Ordinal	3.5
	Pemerataan distribusi	Stiker gakin telah menjangkau seluruh masyarakat miskin di daerahnya	Ordinal	4.1

Pemerataan		Pemerataan dalam pemasangan stiker di rumah keluarga miskin	Ordinal	4.2
	Outcomes pemerataan	Menurut responden terdapat perbedaan jumlah masyarakat miskin di kampung tersebut	Ordinal	4.3
		Tidak ada stigma negatif dari masyarakat	Ordinal	4.4
Responsivitas	Memuaskan kebutuhan preferensi kelompok sasaran	Kebijakan labelisasi dikehendaki oleh masyarakat miskin	Ordinal	5.1
		Kebijakan labelisasi memudahkan masyarakat miskin mendapatkan bantuan	Ordinal	5.2
	Tanggapan kepuasan kelompok sasaran	Masyarakat miskin diuntungkan dengan kebijakan labelisasi	Ordinal	5.3
		Tidak ada konflik dan kecemburuan sosial yang muncul di masyarakat dengan adanya kebijakan labelisasi	Ordinal	5.4
Ketepatan	Nilai dan Manfaat Program	Kebijakan labelisasi dapat meningkatkan produktifitas masyarakat melalui bantuan yang diberikan	Ordinal	6.1
		Adanya pemberdayaan kepada mereka yang diberi label	Ordinal	6.2
	Dampak tak terduga	Kebijakan labelisasi tidak berdampak psikologi pada masyarakat	Ordinal	6.3
		Tidak ada stigma negatif dari masyarakat	Ordinal	6.4

Sumber: diolah peneliti, 2024

1.9. Kerangka Berpikir



1.10. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan John Creswell (2016) dalam bukunya “Research Design” sebagai berbagai cara peneliti untuk mengerjakan penelitiannya. Dalam melakukan proses penelitian ini, langkah-langkah atau metode yang merupakan bagian dari proses penelitian sebagai berikut:

1.10.1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif menurut Bungin (2005:44) dimaksudkan untuk meringkaskan dan menjelaskan berbagai kondisi dan situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Dengan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif maka akan dapat memberikan kecenderungan gambaran secara general dari objek penelitian terhadap evaluasi program stikerisasi keluarga miskin di Kota Surabaya.

1.10.2. Populasi dan Sampel

1.10.2.1. Populasi

Menurut Herryanto & Gantini (2015:3) populasi adalah kumpulan orang atau objek yang karakteristiknya sedang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk miskin kota surabaya yang diberikan penanda stiker keluarga miskin dengan jumlah sebesar 219.427 jiwa yang terdiri dari 75.069 KK menurut data Pemerintah Kota Surabaya tahun 2022.

1.10.2.2. Sampel

Sampling menurut Tayibnapis (2008:97) adalah memilih sebagian dari seluruh kelompok untuk mewakili seluruh kelompok tersebut. Dengan menggunakan sampling berguna untuk menyingkat waktu dan uang karena memilih sebagian dari anggota populasi yang memiliki potensial guna memperoleh informasi. Jumlah sampel pada penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n : Jumlah sampel

N : Jumlah total Populasi

e : batas toleransi eror

Penelitian ini menggunakan batas toleransi eror sebesar 10% karena karakteristik sampel yang homogen sehingga tidak memerlukan jumlah sampel yang banyak. Berdasarkan rumus Slovin diatas perhitungan banyak sampel yang akan diteliti adalah:

$$n = \frac{219.427}{1 + (219.427) (5\%)^2}$$

$$n = 99,954 \approx 100$$

Jumlah sampel pada penelitian ini sebesar 100 sampel.

1.10.3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, teknik *Non probability sampling* dipilih untuk digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Menurut Sugiyono (2019:131) teknik ini dirancang dengan tujuan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota dalam populasi dipilih sebagai sampel.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kuota. Menurut Prasetyo dan Lina (2005:136) kuota *sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang karakteristiknya sama dengan teknik pengambilan sampel stratifikasi namun perbedaannya terletak pada pengambilan sampel dapat dilakukan menggunakan cara kemudahan (*Accident*). Artinya dalam memilih sampel dapat memudahkan dalam peneliti karena sampel dipilih pada saat menemui sampel dari populasi yang sesuai dengan kriteria.

Tabel 1.5 Data Penduduk Miskin yang Ditempel Stiker Keluarga Miskin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022 dan 2023

Surabaya Utara				Surabaya Selatan			
KECAMATAN	2022	2023	PROGRES	KECAMATAN	2022	2023	PROGRES
SEMAMPIR	14782	15171	NAIK	DUKUH PAKIS	6550	3154	TURUN
KREMBANGAN	9481	11512	NAIK	KARANG PILANG	5650	6074	NAIK
KENJERAN	7776	5745	TURUN	WIYUNG	3009	1328	TURUN
PABEAN CANTIAN	6094	10487	NAIK	JAMBANGAN	2079	1853	TURUN
BULAK	3324	1486	TURUN	GAYUNGAN	1092	689	TURUN
Surabaya Timur				Surabaya Pusat			
TAMBAKSARI	31036	19654	TURUN	SIMOKERTO	10846	9686	TURUN
GUBENG	12547	9613	TURUN	TEGALSARI	10051	10882	NAIK
SUKOLILO	6810	4365	TURUN	GENTENG	7240	4429	TURUN
MULYOOREJO	4140	2468	TURUN	BUBUTAN	5658	4253	TURUN
RUNGKUT	2685	1462	TURUN	Surabaya Barat			
TENGGILIS MEJOYO	2504	1526	TURUN	SUKOMANUNGGAL	15242	3410	TURUN
GUNUNG ANYAR	1255	968	TURUN	SAMBIKEREP	5487	4628	TURUN
Surabaya Selatan				ASEM ROWO	4456	3607	TURUN
WONOKROMO	17115	11973	TURUN	TANDES	2219	1733	TURUN
SAWAHAN	10258	13321	NAIK	PAKAL	1601	1542	TURUN
WONOCOLO	6990	5509	TURUN	LAKARSANTRI	765	1041	NAIK
				BENOWO	685	816	NAIK

 wilayah penelitian

Sumber: Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosiasl,
Dinas Sosial Kota Surabaya 2023

Sampel penelitian ini dikelompokkan atau stratifikasi berdasarkan pada kelompok kecamatan di Kota Surabaya. Seperti pada tabel 1.6 diatas, tidak seluruh kecamatan mengalami penurunan angka kemiskinan setelah ditempel stiker keluarga miskin pada akhir tahun 2022. Sehingga wilayah yang akan digunakan menjadi sampel penelitian adalah dengan memilih salah satu kecamatan pada masing-masing zona bagian barat, utara, timur, selatan dan pusat sehingga

harapannya dapat merepresentasikan hasil evaluasi program yang lebih optimal dan dapat memberikan data secara mendalam mengenai program stikerisasi keluarga miskin.

1.10.4. Jenis Data dan Sumber Data

1.10.4.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berbentuk angka yang didapatkan dari kuesioner. Kemudian setelah dilakukan olah data dapat dianalisis menggunakan kalimat berupa deskriptif.

1.10.4.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari sumber pertama saat melakukan penelitian pada objek lokasi penelitian (Bungin, 2005:132). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui kuesioner/angket yang disebarkan kepada penerima program labelisasi keluarga miskin secara langsung beserta observasi. Kemudian data primer juga diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang berwenang sebagai data pendukung dalam melakukan membangun argumen hasil penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui sumber kedua. Artinya data yang didapatkan telah diolah oleh pemilik data, sehingga data ini dapat diperoleh dengan cepat namun beberapa data perlu membutuhkan akses untuk mendapatkannya (Bungin, 2005:132). Data sekunder dalam

penelitian ini yaitu dokumen yang terpublikasi *online/offline* seperti jurnal, website pemerintah, dokumen statistik dari BPS, data yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Surabaya, petunjuk teknis kebijakan, dan peraturan terkait guna menunjang penelitian. Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk menguatkan data primer.

1.10.5. Skala Pengukuran

Dalam penelitian kuantitatif, skala pengukuran digunakan untuk menilai indikator variabel dalam penelitian. Penentuan pemilihan skala pengukuran dalam penelitian kuantitatif lebih mudah karena pemilihan berdasarkan kemauan peneliti dengan melihat kecenderungan data dan teknik analisis data yang akan dipakai (Bugin, 2005:103-105). Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert dengan skor pengukuran sebagai berikut:

SS	penanda jawaban Sangat Setuju	diberi skor	5
S	penanda jawaban Setuju	diberi skor	4
RG	penanda jawaban Ragu-Ragu	diberi skor	3
TS	penanda jawaban Tidak Setuju	diberi skor	2
STS	penanda jawaban Sangat Tidak Setuju	diberi skor	1

1.10.6. Teknik Pengumpulan Data

Data diperlukan dalam penelitian untuk membangun sebuah argumen penelitian. Oleh karena itu perlunya memastikan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Kuesioner/angket

Menurut Sugiyono (2018:142) kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Daftar pertanyaan dan pernyataan ini berkorelasi dengan masalah penelitian, sehingga setiap pertanyaan atau pernyataan memiliki jawaban yang mempunyai relevansi untuk menjawab permasalahan.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan peninjauan yang jelas, lengkap, dan rinci untuk mendapatkan gambaran dari fenomena yang sedang diteliti sehingga dapat digunakan untuk memperkuat hasil wawancara apabila terdapat kondisi yang membuat data tidak valid. Observasi dilakukan di rumah-rumah keluarga miskin yang dipasang stiker keluarga miskin saat melakukan penyebaran angket. Kegiatan observasi yang dilakukan antara lain melihat kondisi rumah apakah dikatakan layak masuk data keluarga miskin dan apakah terdapat rumah yang seharusnya layak masuk keluarga miskin namun tidak ditempel oleh stiker keluarga miskin.

3. Wawancara

Menurut Sugiyono (2018:234) wawancara bertujuan mengali data untuk mengetahui permasalahan yang sedang diteliti Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara sebagai pelengkap dan memperkuat argumen yang dibangun dalam analisis data dari penelitian deskriptif kuantitatif. Informan dalam wawancara penelitian ini adalah Kepala Dinas Kota Surabaya, petugas pelaksana, dan apabila memungkinkan melakukan wawancara dengan Walikota Surabaya.

1.10.7. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data primer untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang akan diolah menjadi sumber data utama penelitian ini adalah data angket dengan responden keluarga pra sejahtera di Kota Surabaya. Tahapan pengolahan data penelitian ini sebagai berikut:

1. *Editing*

Editing adalah tahapan yang digunakan untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasan data yang diperoleh. Tahapan ini dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan kelengkapan komponen jawaban angket dan memberikan nomor urut pada setiap angket.

2. *Coding*

Coding adalah tahapan yang digunakan untuk memberikan kode pada jawaban angket sehingga nantinya dapat memudahkan proses pengolahan data. Tahapan ini dilakukan dengan memasukan data kedalam rumah data SPSS. Komponen yang akan dimasukan dalam SPSS terdiri dari nomor urut responden, pertanyaan, dan memasukan jawaban dari responden yang telah diberikan kode.

3. *Tabulating*

Tabulating adalah tahapan pengolahan data dalam bentuk tabel sehingga menghasilkan data yang lebih ringkas. Tahapan ini dilakukan setelah tahapan *coding* selesai dengan bantuan fitur tabel distribusi frekuensi yang ada di SPSS.

Dari tabel tersebut kemudian dapat dilakukan analisis data untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.10.8. Teknik Pengujian Data

1.10.8.1. Uji Validitas

Valid atau tidaknya kuesioner diukur dengan menggunakan uji validitas. Pertanyaan pada kuesioner dapat dikatakan dapat menangkap suatu yang diukur apabila pertanyaan tersebut valid. Kevalidan pertanyaan didapat dengan cara mencari terlebih dahulu r hitung dari seluruh jawaban pertanyaan. Seluruh jumlah jawaban pertanyaan tersebut akan dikurangi dua jawaban yang disebut dengan (*degree of freedom*)

$$df = n - 2$$

Apabila diketahui r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif, maka dinyatakan valid sebagai pertanyaan dalam kuesioner (Ghozali, 2018: 52-53).

1.10.8.2. Uji Reliabilitas

Menurut Arikunto (2013:221) instrumen dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data apabila telah dilakukan uji reliabilitas yang berguna mengetahui responden konsisten dalam memberikan tanggapan pada sebuah pertanyaan atau pernyataan. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan acuan nilai *Cronbach's Alpha* tiap variabel. Ghozali (2018: 48) mengatakan suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$.

1.10.9. Teknik Analisis Data

Analisis data didefinisikan oleh Ahmad (2015:174) sebagai rangkaian proses menelaah, mengelompokan, menafsiran, dan memverifikasi data sehingga

sebuah data memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Seperti pada umumnya, penelitian kuantitatif yang menggunakan menggunakan deskriptif dalam analisis, maka dibutuhkanlah data statistik guna membantu mendeskripsikan hasil dari penelitian. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Sugiyono dalam bukunya. Menurut Sugiyono (2018:147) tujuan digunakan statistik deskriptif adalah untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang umum atau generalisasi. Sehingga teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif.

Penelitian deskriptif kuantitatif ini tidak dilakukan secara asosiatif maupun komparatif. Sehingga hasil penelitian ini tidak digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat ataupun tidak digunakan untuk mengetahui korelasi atau sebab akibat dari dua variabel (Yusuf, 2015:63). Maka dari itu, interpretasi/penafsiran data berupa angka yang diolah SPSS dilakukan semata-mata untuk memperjelas penyajian data.

Tujuan dari analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan jawaban responden dalam kuesioner pada masing-masing variabel maupun indikator. Pendeskripsian dilakukan dengan cara membuat presentase dari masing-masing kategori jawaban indikator yang berasal dari skala likert. Dengan mendeskripsikan jawaban indikator diharapkan dapat menjelaskan penilaian responden mengenai evaluasi program stikerisasi keluarga miskin di Kota Surabaya berdasarkan variabel efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemertaan, responsivitas, dan ketepatan . Setelah hasil pengolahan data dan pengujian data selesai maka jawaban responden akan

dapat diketahui kategori pernyataan responden tentang masing-masing variabel dalam rentan skala mean.

Menurut Sugiyono (2015:92) untuk menentukan panjang kelas interval menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Panjang Kelas} = \frac{\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} = \frac{5-1}{5} = 0,8$$

Dari hasil interval kelas 0,8 maka dapat disimpulkan kriteria rata-rata jawaban responden adalah

Tabel 1.6. Tabel Interval Kelas

$1,00 < x \leq 1,80$	Sangat Tidak Setuju
$1,80 < x \leq 2,60$	Tidak Setuju
$2,60 < x \leq 3,40$	Ragu-Ragu
$3,40 < x \leq 4,20$	Setuju
$4,20 < x \leq 5,00$	Sangat Setuju

Sumber: Sugiyono (2015:93)

Tabel 1.6 menunjukkan terdapat rentang kategori yang dapat digunakan untuk melakukan analisis penilaian masyarakat terhadap program stikerisasi keluarga miskin di Kota Surabaya.